

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bergesernya paradigma manajemen pemerintahan dalam dua dekade terakhir yaitu dari berorientasi proses menjadi berorientasi hasil telah ikut mereformasi sistem pengelolaan keuangan Negara baik di Negara maju maupun Negara berkembang seperti Negara Indonesia ini. Ditambah dengan adanya sistem desentralisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk membentuk jiwa kemandirian di tiap daerah di Indonesia. Desentralisasi sendiri berarti pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah itu sendiri serta pertanggung jawaban atas pemakaian anggaran yang telah diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Reformasi pengelolaan keuangan Negara di Indonesia yang diawali dengan keluarnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah membawa banyak perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan Negara. Perubahan tersebut juga memperkenalkan pendekatan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) dalam penyusunan anggaran pemerintah.

Pada peraturan perundang-undangan No. 58 Tahun 2005 yang mempedomani Undang-undang No.17 Tahun 2003 berkenaan pengelolaan keuangan Daerah merupakan implementasi dari terlaksananya sistem desentralisasi di Indonesia. Hal

ini memberikan dampak yang cukup signifikan dibandingkan dengan sistem sentralisasi yang dianut sebelumnya. Tiap daerah mampu mengembangkan potensi apapun yang ada pada wilayahnya untuk dapat menghasilkan penghasilan yang besar untuk dapat mensejahterakan daerahnya. Namun hal ini juga memiliki dampak negatif. Diantaranya ketimpangan antar daerah karena tidak semua daerah yang siap dengan sistem desentralisasi tersebut. Ketimpangan penghasilan antar daerah diatasi dengan adanya dana perimbangan yang di transfer ke daerah yang pendapatannya dibawah rata-rata daerah lainnya.

Transfer yang dilakukan pemerintah pusat ke setiap daerah dilakukan dengan sistem peradilan dengan mengikuti perundang-undangan dan pertanggung jawaban. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diwajibkan pula melakukan pertanggung jawaban kepada pemerintah pusat dalam bentuk laporan yang selanjutnya akan di periksa oleh badan yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk memastikan kelayakan dari laporan tersebut.

Laporan pemerintah daerah berisi pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya merupakan keuangan Negara. Laporan-laporan akan diperiksa berdasarkan standar-standar pemeriksaan yang telah ada. Standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau pemeriksa. Pemeriksaan juga merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan professional

berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan. Sementara itu, tanggung jawab keuangan Negara adalah kewajiban pemerintah, lembaga Negara lainnya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Negara secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparansi dengan memerhatikan ras keadilan dan kepatuhan.

Jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Berpedoman pada ketiga jenis pemeriksaan tersebut, penulis ingin memfokuskan kepada pemeriksaan kinerja yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan perencanaan anggaran di tahun setelahnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dengan judul **“ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PADANG”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan tentang pelaporan kinerja pada latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana sistem penilaian kinerja serta pengevaluasian yang diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang?
2. Apa metode pengukuran pencapaian kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang?

1.3 Tujuan Magang

Diharapkan selesai mengikuti kegiatan magang, penulis telah mampu dan terampil dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan praktik yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Program Diploma III Universitas Andalas dengan tujuan yaitu :

1. Untuk membantu penulis dalam mencari tahu mengenai sistem penilaian kinerja serta pengevaluasian yang diterapkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang.
2. Penulis dapat mengetahui metode apa yang dipakai dalam pengukuran kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang.

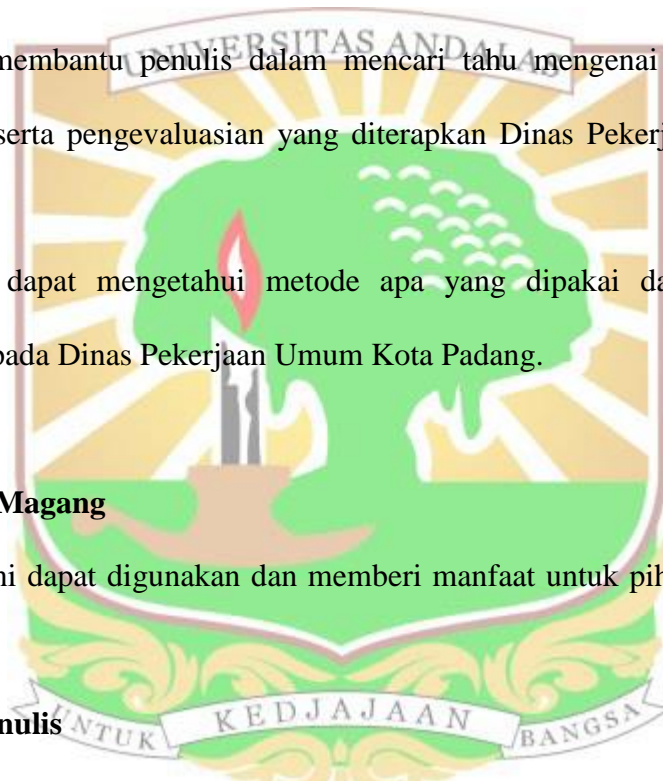
1.4 Manfaat Magang

Penelitian ini dapat digunakan dan memberi manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Adapun manfaat magang bagi penulis yaitu :

1. Untuk mempersiapkan diri sebagai Sumber Daya Manusia yang berkualitas untuk menghadapi persaingan pada masa yang akan datang.
2. Membantu penulis untuk mendapatkan pengetahuan tentang sistem kerja serta aktivitas yang dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang



3. Penulis mengerti tentang akuntabilitas laporan, sistem, tata cara penilaian kinerja yang diterapkan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang.
4. Meningkatkan pengetahuan penulis mengenai dokumen yang terkait pada pelaporan berdasarkan akuntabilitas kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum.

2. Bagi Universitas

Untuk menjalin kerjasama serta hubungan baik antara kependidikan dengan instansi/perusahaan serta dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja magang dan Universitas juga dikenal oleh dunia kerja.

3. Bagi Tempat Magang

Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan instansi/perusahaan sehingga dapat menjalin hubungan yang lebih baik antara kedua pihak dan instansi/perusahaan tersebut lebih dikenal oleh kalangan akademis.

1.5 Tempat, Waktu dan Kegiatan Magang

Magang adalah syarat utama untuk melalui proses pendidikan program Diploma III Universitas Andalas. Mahasiswa tingkat akhir diwajibkan untuk melakukan magang di suatu perusahaan sebelum mendapat gelarnya. Magang merupakan bagian dari pelatihan kerja, dalam kegiatan magang kita memiliki kesempatan mengaplikasikan semua ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah dan mempelajari detail tentang seluk beluk standar kerja yang profesional.

Penulis melakukan magang di Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang yang beralamatkan di Jalan Ujung Gurun Nomor 2 Padang. Magang berlangsung selama 40 hari kerja.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan magang ini dibagi atas lima bab yang mana disetiap bab terdiri dari 5 bab yang akan membahas hal-hal berikut :

BAB I Pendahuluan

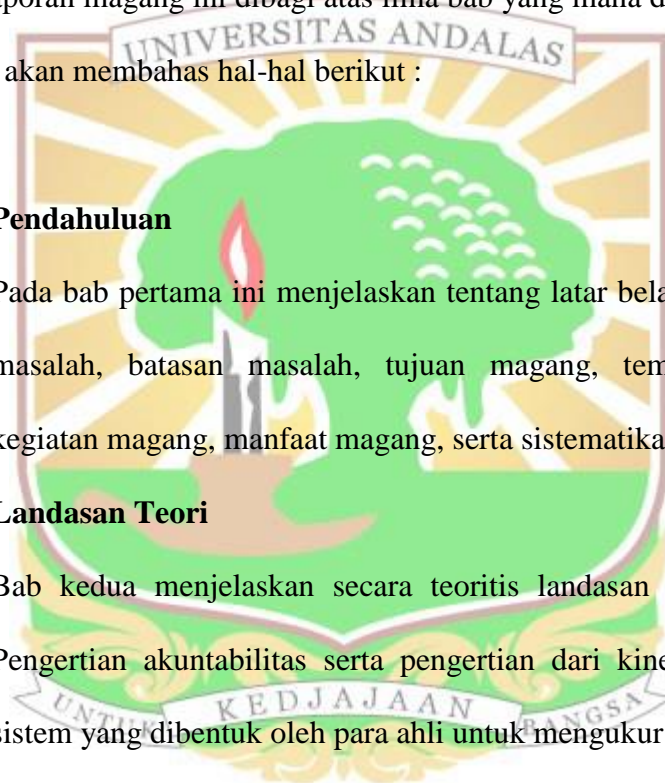
Pada bab pertama ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan magang, tempat, waktu dan kegiatan magang, manfaat magang, serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab kedua menjelaskan secara teoritis landasan materi mengenai Pengertian akuntabilitas serta pengertian dari kinerja serta sistem-sistem yang dibentuk oleh para ahli untuk mengukur sebuah kinerja.

BAB III Gambaran Umum

Bab ini berisikan tentang gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, sejarah umum Dinas Prasarana Jalan, Visi, Misi serta dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang.



BAB IV Pembahasan

Isi bab keempat merupakan inti dari penulisan yang membahas mengenai sistem yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dalam mengukur kinerja pemerintah serta tata cara pengevaluasian internal.

BAB V Penutup

Pada bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran yang bermanfaat berdasarkan hasil dari tinjauan penulis.

